**BAB I :**

**PENDAHULUAN**

## Fungsi dan Kewenangan

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi merupakan Dinas teknis di tingkat Kabupaten yang mengampu 2 urusan Kementrian di tingkat Pusat yaitu Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Kementrian Pertanian Republik Indonesia. Pemantapan pembangunan di bidang pangan berupa penurunan jumlah daerah rawan pangan, peningkatan skor PPH ketersediaan dan peningkatan konsumsi masyarakat sesuai kaidah pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (**B2SA**)  serta peningkatan produksi perikanan dan konsumsi ikan dalam bidang perikanan adalah upaya yang di laksanakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana,serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian, pangan dan perikanan.

Dinas Pangan dan Perikanan kabupaten Ngawi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah sebagaiman yang tercantum dalam dalam surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor 41 Tahun 2019 yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pangan dan Perikanan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sebagaimana yang tertuang dalam tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diberikan. Adapun fungsi dan kewenangan tersebut adalah;

* 1. **Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pangan dan Perikanan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, distribusi pangan, akses pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta bidang perikanan;
2. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, distribusi pangan, akses pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta bidang perikanan;
3. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan,cadangan pangan, distribusi pangan, akses pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta dibidang perikanan;
4. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang cadangan pangan, distribusi pangan, akses pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta bidang perikanan;
5. Pelaksaanaan administrasi Dinas Pangan dan Perikanan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
   1. **Kewenangan**

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi mempunyai kewenangan :

1. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten;
2. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
3. pengelolaan cadangan pangan kabupaten;
4. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi;
5. promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
6. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan;
7. penanganan kerawanan pangan kabupaten;
8. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten;
9. rekomendasi izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten;
10. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
11. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
12. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Susunan Organisasi Dinas Pangan dan Perikanan terdiri dari :

* 1. Kepala

1. Sekretaris
2. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan
3. BIdang Keamanan dan Diversifikasi Konsumsi Pangan
4. Bidang Distribusi dan Akses Pangan
5. Bidang Perikanan

Dalam melaksanakan fungsi tersebut dituangkan pada uraian tugas yang terdiri dari Sekretariat dan Empat Bidang sebagai berikut :

1. ***Sekretariat,***

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untukmelaksanakan tugas tersebut di atas, Sekretariat mempunyai mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis;
2. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
3. Pengelolaan administrasi keuangan ;
4. Pengelolaan administrasi data dan peningkatan kapasitas kepegawaian ;
5. Pengelolaan administrasi surat menyurat,kearsipan,dokumentasi dan rumah tangga ;
6. Pengelolaan barang dan jasa inventaris ;
7. Pengkoordinasian tugas-tugas teknis bidang ;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kinerja sesuai program dan kegiatan OPD dan;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi tiga Sub Bagian yaitu :

1. *Sub Bagian Perencanaan,* mempunyai tugas :
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan program dan Kegiatan;
3. Menyiapkan bahan koordinasi usulan program dan kegiatan;
4. Menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Melaksanakan pengumpulan,pengolahan dan penyajian data statistik pangan dan perikanan;
6. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan atas kinerja OPD sesuai dengan program dan kegiatan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
8. *Sub Bagian Keuangan,* mempunyai tugas :
9. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun rencana penyerapan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung
10. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
11. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan Penerimaan Pendapatan daerah sektor pangan dan perikanan.
12. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan; dan
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
14. *Sub Bagian Umum,* mempunyai tugas :
15. Melaksanakan kegiatan tata usaha surat menyurat, penggandaan dan tata kearsipan.
16. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan kebutuhan barang.
17. Melaksankan kegiatan pemeliharaan perlengkapan, peralatan kantor, kebersihan dan keamanan kantor.
18. Melaksanakan pengurusan tugas-tugas keprotokolan dan koordinasi perjalanan dinas.
19. Melaksanakan penyiapan dan penyajian informasi.
20. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dokmentasi dan kepustakaan.
21. Menyiapakan bahan pengelolaan data administrasi dan peningkatan kapasitas kepegawaian; dan
22. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
23. ***Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan****,* mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Perikanan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program peningkatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan;;
2. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan cadangan pangan;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan dan cadangan pangan
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan dan cadangan pangan;
5. Penyiapan pelaksanaan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah,swasta dan masyarakat dalam rangka penguatan ketersediaan,sumberdaya pangan,peningkatan cadangan pangan dan penanganan daerah rawan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan cadangan pangan ; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan membawahi :

1. *Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan,* mempunyai tugas :
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem ketersedian pangan dan sumberdaya pangan;
3. Menyiapkan bahan koordinasi dibidang ketersediaan pangan,penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pangan lainnya;
4. Menyiapkan bahan pengkajian di bidang ketersediaan panga, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pangan lainnya;
5. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
6. Menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan,penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
7. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi,supervise dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pangan lainnya;
8. Menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah ;
9. Melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan ;
10. Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan;
11. Menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan analisis pola pangan harapan ketersediaan pangan;
12. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
13. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
14. Penyiapan pelaksanaan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah,swasta dan masyarakat dalam rangka penguatan ketersediaan dan sumber daya pangan;
15. Menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamanan nasional;
16. Melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan seksi ketersediaan dan sumberdaya pangan; dan
17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Ketersediaan dan cadangan pangan sesuai dengan tugasnya.
18. *Seksi Cadangan dan Kerawanan Pangan,* mempunyai tugas :
19. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penguatan cadangan pangan dan penanganan daerah rawan pangan;
20. Menyiapkan bahan koordinasi cadangan pangan dan penangana kerawanan pangan;
21. Menyiapkan bahan analisis dan kanian cadangan pangan penanganan kerawanan pangan;
22. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
23. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervise di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
24. Menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangan;
25. Menyiapkan bahan penyusunan dan analisis system kewaspadaan pangan dan gizi;
26. Menyiapkan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
27. Penyiapan pelaksanaan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah , swasta dan masyarakat dalam rangka penguatan cadangan pangan dan penanganan daerah rawan pangan;
28. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi cadangan dan kerawanan pangan; dan
29. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang ketersediaan pangan dan cadangan pangan sesuai dengan tugasnya.
30. ***Bidang Keamanan dan Diversifikasi Konsumsi Pangan****,*mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Dinas konsumsi pangan dan perikanan di bidang Keamanan dan Diversifiksi Pangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya bidang keamanan dan Difersifikasi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program peningkatan keamanan dan difersifikasi konsumsi pangan dan program pembinaan lingkungan social bidang ketenagakerjaan sub bidang pangan
2. Pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan ;
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
6. Penyiapan pelaksanaan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah,swasta dan masyrakat dalam rangka peningkatan konsumsi, penganekaragaman pangan,mutu dan kemanan pangan;
7. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kemanan dab difersifikasi konsumsi pangan ;
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya ;

Bidang Keamanan dan Difersifikasi Konsumsi Pangan membawahi :

1. *Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan,*mempunyai tugas :
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengembangan penganekaragaman pangan; dan kegiatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja dan masyrakat melalui pertain dan pelaku agribisnis;
3. Menyiapkan bahan koordinasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
4. Menyiapkan bahan analisis dan kajian konsumsi dan penganekaragaman pangan ;
5. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
6. Menyiapkan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun ;
7. Menyiapkan penghitungan tingkat konsumsi energy dan protein masyarakat per kapita per tahun;
8. Menyiapkan perhitungan pola pangan harapan tingkat konsumsi;
9. Menyiapkan bahan penyusunan pola konsumsi pangan ;
10. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
11. Menyiapkan bahan analisis dan
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan sesuai dengan bidang tugasnya.
13. *Seksi Mutu dan Keamanan Pangan,* mempunyai tugas :
14. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan; dan kegiatan pengembangan kewirausahaan dan agrobisnis bidang pangan.
15. Merencanakan bahan rumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan keamanan pangan;
16. Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan mutu dan keamanan pangan;
17. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
18. Melaksanakan analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat;
19. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan mutu serta keamanan produk pangan masyarakat;
20. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrik skala kecil/rumah tangga;
21. Melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu,gizi dan kemanan pangan;
22. Melaksanakan peningkatan mutu dan gizi konsumsi masyarakat;
23. Menyiapkan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah,swasta dan masyarakat dalam peningkatan mutu dan keamanan pangan;
24. Menyiapkan bahan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
25. Menyiapkan pelaksanaan komunikasi,informasi dan edukasi mutu dan keamanan pangan;
26. Menyiapkan bahan koordinasi mutu dan keamanan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional;
27. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan pangan;
28. Penyiapan pelaksanaan bahan kerjasaman antar lembaga pemerintah,swasta dan masyrakat dalam rangka kegiatan mutu dan keamanan pangan;
29. Melakukan monitoring,evaluasi dan pelaporan seksi mutu dan keamanan pangan ; dan
30. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang keamanan dan difersifikasi konsumsi pangan sesuai dengan bidang tugasnya.
31. ***Bidang Distribusi dan Akses Pangan****,* mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Perikanan di bidang distribusi dan Akses Pangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Distribusi dan Akses Pangan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program peningkatan distribusi dan akses pangan;
2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan akses pangan ;
3. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan akses pangan ;
4. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan akses pangan ;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan akses pangan;
6. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan akses pangan;
7. Penyiapan pelaksanaan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah swasta dan masyarakat dalam rangka kegiatan distribusi pangan, harga pangan dan akses pangan;
8. Pelaksanaan monitoring ,evaluasi dan pelaporan bidang distribusi dan akses pangan;dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan dan Perikanan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

Bidang Distribusi dan Akses Pangan membawahi :

1. *Seksi Distribusi Pangan,* yang mempunyai tugas :
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat ;
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi distribusi pangan.
4. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian distribusi pangan;
5. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi pangan.
6. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok pangan ;
7. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervise dibidang distribusi pangan;
8. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan ;
9. Penyiapan pelaksanaan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah,swasta masyarakat dalam rangka kegiatan distribusi pangan;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi distribusi pangan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang distribusi Akses Pangan.
12. *Seksi Akses Pangan,* mempunyai tugas :
13. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penyusunan informasi harga pangan dan pasokan hargan.
14. Melakukan penyiapan bahan koordinasi akses, pasokan dan harga pangan.
15. Melakukan penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
16. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang pasokan dan harga pangan;
17. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pasokan dan harga pangan;
18. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
19. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
20. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi akses,pasokan dan harga pangan;
21. Menyiapkan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka pengembangan akses pangan;
22. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi akses pangan; dan
23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang distribusi dan akses pangan.
24. ***Bidang Perikanan****,* mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Perikanan di bidang perikanan serta tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas bidang perikanan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program pengembangan perikanan; dan program pembinaan lingkungan social bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sub bidang perikanan;
2. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pembudidaya ikan dan nelayan perairan umum darat (PUD)
3. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian rekomendasi sertifikasi tentang cara budidaya ikan yang baik (CBIB), Cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB);
4. Pemberian fasilitas kebijakan pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha pembudidaya Ikan (TPUPI);
5. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga pemerintah,swasta dan masyrakat dalam rangka pengelolaan pembudiodaya ikan ;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan ; dan
7. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pangan dan Perikanan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

Bidang Perikanan membawahi :

1. *Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan,* mempunyai tugas :
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan, kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan dan pengembangan bibit ikan unggul;
3. Melaksanakan pengumpulan data informasi, identifikasi, analisis, kebijakan, tentang rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasar rencana tata ruang wilayah (RTRW)
4. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan serta pembinaan mutu pakan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
5. Menyiapkan bahan pembinaan tentang cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan Cara budidaya ikan yang baik 9CBIB) penyediaan benih ikan calon induk dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk ikan dan/atau benih ikan;
6. Menyiapkan bahan kerjasama antara lembaga pemerintah,swasta dan masyarakat dalam rangka pengelolaan pembudidaya ikan ;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pengelolaan pembudidaya ikan ; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.
9. *Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan dan Nelayan Kecil,* mempunyai tugas :
10. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap; serta kegiatan bantuan sarana produksi perikanan bagi masyarakat/kelompok masyarakat ;
11. Melaksanakan pengumpulan data informasi, identifikasi, analisis, kebijakan, tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan dan nelayan kecil ;
12. Melaksanakan fasilitas pendidikan dan pelatihan serta pendampingan kemitrausahaan akses ilmu pengetahuan dan teknologi serta kelembagaan usah kecil pembudidayaan ikan dan nelayan kecil;
13. Menyiapkan fasilitas dan bahan rekomendasi tentang penerbitan surat izin usaha bidang perikanan berupa Tanda Pencatatan usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) dan tanda pencatatan Kapal pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) ;
14. Melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan seksi pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan nelayan kecil ;
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Sumber Daya Manusia

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masingmasing. Sebagai salah satu perangkat kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi didukung oleh sejumlah personil atau pegawai berdasarkan masing – masing komposisi pegawai tergambarkan sebagai berikut :

* 1. Pangkat dan Golongan PNS Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah |
| 1. | Pegawai Golongan IV | 8 |
| 2. | Pegawai Golongan III | 22 |
| 3. | Pegawai Golongan II | 17 |
| 4. | Pegawai Golongan I | - |

* 1. Keadaan Pegawai berdasarkan Eselonisasi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah |
| 1. | Pejabat Eselon II/B | 1 |
| 2. | Pejabat Eselon III/A | 1 |
| 3. | Pejabat Eselon III/B | 4 |
| 4. | Pejabat Eselon IV/A | 11 |

* 1. Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah |
| 1. | Pasca Sarjana ( S2 ) | 7 |
| 2. | Sarjana ( S1 ) | 30 |
| 3. | D3 | 2 |
| 4. | SLTA | 8 |
| 5. | SLTP | - |

* 1. Keadaan Pegawai berdasarkan Diklat Struktural :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah |
| 1. | SPAMEN | - |
| 2. | SPAMA | 2 |
| 3. | ADUM / ADUMLA | 10 |

* 1. Keadaaan Pegawai berdasarkan Diklat Fungsional / Kursus :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah |
| 1. | Pengadaan Barang dan Jasa | 3 |

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NGAWI

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN TIPE A

###### **DINAS PANGAN DAN PERIKANAN TIPE A**

**KEPALA**

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

UMUM

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

BIDANG KEAMANAN DAN DIVERSIFIKASI KONSUMSI PANGAN

SEKSI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

BIDANG

PERIKANAN

BIDANG DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN

BIDANG

KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN

SEKSI

PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

SEKSI KETERSEDIAAN DAN SUMBER DAYA PANGAN

SEKSI KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAM PANGAN

SEKSI DISTRIBUSI PANGAN

SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL PEMBUDIDAYAAN IKAN DAN NELAYAN KECIL

SEKSI AKSES PANGAN

SEKSI CADANGAN DAN KERAWANAN PANGAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

## Keuangan

Secara ringkas, kinerja Dinas Pangan dan Perikanan tahun 2021

adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Pagu Anggaran  Rp | Realisasi  Rp | % |
| 1.  2  3. | Belanja Pegawai  Belanja Barang Jasa  Belanja Modal | 4.788.030.024,00  5.712.062.574,00  84.455.000,00 | 4.609.140.373,00  5.238.896.305,00  82.756.000,00 | 96,26  91,72  97,99 |
|  | Jumlah | 10.584.547.598,00 | 9.930.792.678,00 | 93,82 |

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi anggaran di Dinas Pangan dan Perikanan pada tahun 2021 adalah sebesar 93,82%, hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang memiliki sisa kontrak.

## Nilai Aset

Nilai Asset Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Nilai** | |
| **2020** | **2021** |
| 1 | Tanah | 2.524.250.000,00 | 2.524.250.000,00 |
| 2 | Mesin dan Peralatan | 6.897.231.161,00 | 6.980.328.161,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 25.162.235.797,55 | 25.116.437.797.55 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan jaringan | 7.537.304.776,72 | 7.583.102.776,72 |
| 5 | Asset Tetap lainnya | 370.413.488,00 | 370.413.488,00 |
| 6. | Konstruksi dalam Pengerjaan | 321.758.180,00 | 321.758.180,00 |
|  | | 42.813.193.403,27 | 42.896.290.403,27 |

1. **ISU STRATEGIS DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**

Adapun permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan dalam upaya penuruan tingkat kemiskinan dan pembangunan ekonomi sesuaivisi misi bupati adalah :

1. Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi
2. Terjadinya penurunan daya dukung sumber daya pertanian yang disebabkan oleh
3. Tingginya laju alih fungsi lahan sawah
4. Menurunnya tingkat kesuburan tanah
5. Kerusakan hutan akibat illegal logging besar-besaran tahun 1998-2000 dan kurang berhasilnya reboisasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta penurunan daya dukung lingkungan
6. Menurunnya ketersediaan sumber-sumber air
7. Dampak perubahan iklim global yang menyebabkan meningkatnya serangan Organisme Perusak Tanaman sehingga menurunkan produksi tanaman pangan
8. Masih Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia yang dimiliki serta pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan kecil
9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan yang ada untuk pemenuhan ketersediaan pangan yang bergizi berimbang dan aman serta peningkatan pendapatan keluarga
10. Pola pangan harapan untuk konsumsi masyarakat ngawi yang belum ideal dan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga perlu sosialisasi pola pangan sesuai kaidah Pola konsumsi pangan sehat tersebut dikenal dengan istilah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

# 

# BAB II : PERENCANAAN KINERJA

## Rencana Strategis

Visi Kabupaten Ngawi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021 :

***“NGAWI SEJAHTERA, BERAKHLAK BERBASIS PEDESAAN SEBAGAI BAROMETER JAWA TIMUR”***

Penjabaran makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Kabupaten Ngawi Sejahtera :**

Sejahtera dalam hal ini memiliki dimensi lahir maupun batin, dimana kondisi masyarakat Kabupaten Ngawi yang mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dengan kemandirian ekonomi secara layak dan berdaya saing. sejahtera lahir diartikan terpenuhi segala kebutuhan lahiriah dan kehidupan ekonomi masyarakat, paling tidak terpenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan sejahtera batin diartikan terpenuhi kebutuhan rohaniah dan kehidupan keagamaan sesuai dengan keyakinan masyarakat masing-masing, seperti kekuatan iman, keleluasan ibadah dan keikhlasan dalam bertindak.

1. **Kabupaten Ngawi Berakhlak:**

Kabupaten Ngawi mampu menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak atau dengan kata lain memiliki jati diri dan karakter masyarakat (bangsa). Masyarakat yang berakhlak diwujudkan melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai - nilai luhur budaya bangsa dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan bangsa.

1. **Kabupaten Ngawi Berbasis Pedesaan sebagai Barometer Jawa Timur :**

Kabupaten Ngawi mampu membangun daerahnya dengan berbasis pedesaan dimana pembangunannya bertumpu pada potensi Pertanian. Pilihan utama pengembangan kegiatan ekonomi sesuai potensi dan keunggulan daerah, yaitu sektor Pertanian, Industri dan Perdagangan. Pertanian, Industri dan Perdagangan menjadi *core competence* dan sekaligus sebagai activity driver bagi Kabupaten Ngawi.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab Dinas Pangan dan Perikanan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi mengemban misi Ke-Satu : ***Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan*** dan misi ke 4: ***Mengembangkan iklim usaha dan ekonomi kerakyatan berbasis agraris*.**

Selain menjadi suatu institusi yang kompeten, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi juga harus menjadi suatu lembaga yang kredibel dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi, profesionalisme dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.

## Indikator Kinerja Utama

Untuk mendukung tercapainya misi, telah ditetapkan berbagai tujuan dan sasaran yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi adalah disajikan pada tabel berikut :

**IKU DINAS PANGAN DAN PERIKANAN 2017-2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **KINERJA UTAMA (TUJUAN SASARAN STRATEGIS)** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI PERHITUNGAN** | | **TARGET TAHUNAN** | | | | |
|  | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | **Meningkatnya Kwantitas dan Kwalitas Pangan Utama Daerah** | **Angka ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari)** |  | | **8.529** | **8.178** | **8.338** | **8.418** | **8.418** |
| **Angka ketersediaan Protein (Kkal/kapita/hari)** |  | | **201,31** | **209,54** | **213,84** | **218,11** | **218,12** |
| **Angka kecukupan Energi perkapita** |  | | **2,200** | **2,250** | **2,300** | **2,350** | **2,400** |
| **Angka kecukupan Protein perkapita** |  | | **58** | **60** | **61** | **62** | **63** |
| 2 |  | **Skor PPH Konsumsi** | Nilai capaian peningkatan =% AKG x bobot masing-masing kelompok pangan | x Kandungan protein x BDD | 86,2 | 88,5 | 90,8 | 93,1 | 94 |
|  |  | 100 ton |
| 3 |  | **Coefisien Variasi (CV harga Pangan)** | CV = Standart deviasi x 100 % | | **8** | **7,8** | **7,6** | **7,4** | **7,2** |
|  |  | Harga rata-rata | |
|  |  |
|  | **Meningkatnya Produksi Perikanan** | **Persentase Peningkatan Produksi Perikanan** | Coefisien Variasi ( CV ) adalah : Parameter untuk mengukur fluktuasi harga (naik turunnya) harga dalam kurun waktu tertentu | | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 4 | **∑ ( Produksi Budidaya Kolam Pekarangan + Produksi KJA ) + Produksi Perikanan Tangkap ) + Tahun n ]** |  |
|  | Penjelasan : Produksi Budidaya Kolam Pekarangan adalah : Produksi Ikan Yang Dibudidayakan di Kolam Pekarangan. |
|  | Penjelasan : Produksi Budidaya KJA adalah : Produksi Ikan Yang Dibudidayakan di Keramba Jaring Apung . |
|  | Penjelasan : Produksi Perikanan Tangkap adalah : Produksi dari hasil Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan ( PUD). |

## Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada pimpinan Dinas Pangan dan Perikanan untuk melaksanakan program/kegiatan yang diserta dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan kepala Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja diantaranya adalah wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah untuk  
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 dapat dililhat pada tabel sebagai berikut :

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

## A. Capaian Kinerja Organisasi

### A.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam menghitung capain kinerja, terdapat 3 komponen perhitungan yang dilaksanakan yang didasarkan pada jenis komponen yang diukur.

1. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

% pencapaian kinerja = (realisasi / rencana) x 100%

Indikator kinerja sasaran dengan pencapaian kinerja yang menggunakan perhitungan di atas adalah sebagai berikut

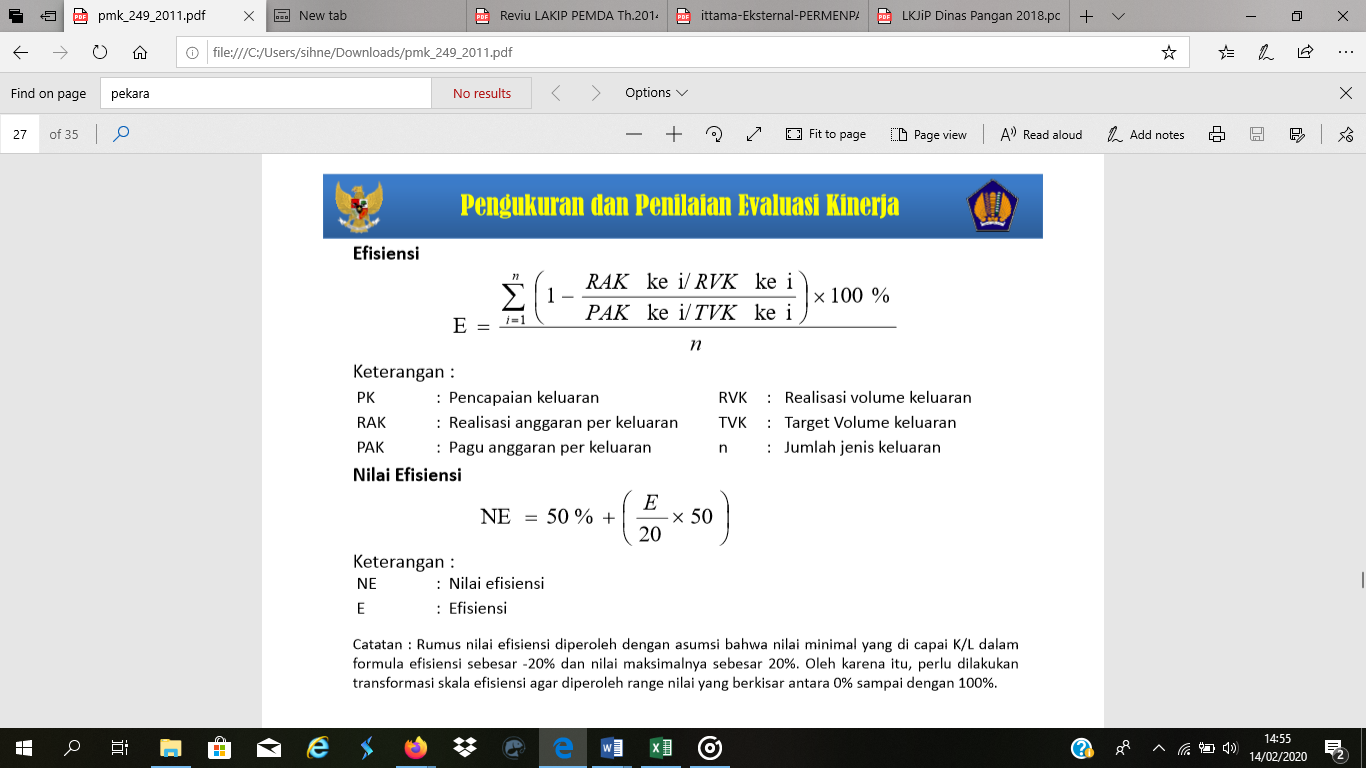
1. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat

capaian yang semakin buruk, dengan rumus perhitungan sebagaiberikut:

% pencapaian kinerja = (rencana – (realisasi – rencana)/rencana ) x100%

1. Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi (NE), mengukur efisiensi pemanfaatan sumberdana(anggaran) dalam mencapai target kinerja. Dimana semakin tinggi Nilai Efisiensi maka semakin efektif penggunaan dana dalam mencapai taget kinerja dinas



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor249/PMK.02/2011 Tgl 28 Desember2011

1. Skala Pengukuran dan Predikat

Kinerja sasaran diperoleh dengan mengitung Indikator Kinerja Sasaran. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skalapengukuran ordinal sebagai berikut:

>95% s.d 100% : Sangat baik

>80% s.d 95% : Baik

>50% s.d 80% : Cukup baik

<50 : Tidak baik

### A.2. Capaian Kinerja atas IKU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | Target akhir Renstra 2021 | Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%) |
| Target | Realisasi | % Realisasi | Target | Realisasi | % Realisasi | Target | Realisasi | % Realisasi | Target | Realisasi | % Realisasi | Target | Realisasi | % Realisasi |
| Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pangan melalui Ketersediaan, distribusi, konsumsi | Angka Ketersediaan energy (Kkal/kapita/hari) | - | - | - | - | - | - | 8338 | **8493** | 101,86% | 8418 | **8487** | 100,82% | 8.418 | 8.587 | 102,01 | 8.418 | 100,81% |
| Angka Ketersediaan protein (Kkal/kapita/hari) | - | - | - | - | - | - | 213,84 | **206,57** | 96,60% | 218,11 | **172,62** | 79,14% | 218,12 | 223,16 | 102,31 | 218,12 | 79,13% |
| Angka Kecukupan energi perkapita | - | - | - | - | - | - | 2300 | **2300** | 100.00% | 2,350 | **2169** | 92.30% | 2.400 | 2.400 | 100,00 | 2.400 | 90,37% |
| Angka Kecukupan protein perkapita | - | - | - | - | - | - | 61 | **61** | 100.00% | 62 | **62.70** | 101.13% | 63 | 63 | 100,00 | 63 | 99,52% |
| Skor PPH Konsumsi | 86,2 | 85,3 | 98,96% | 88,5 | 92,6 | 104,63% | 90,8 | **88,2** | 97.14% | 93,1 | **91,60** | 98.39% | 94 | 86 | 91,5 | 94 | 91,60% |
| Coefisien Variasi (CV Harga Pangan) | 8 | 6,8 | 117,65% | 7,8 | 7,2 | 108,33% | 7,6 | **7,1** | 107.04% | 7,4 | **7,2** | 102,70% | 7,2 | 7,3 | 98,6 | 7,2 | 100% |
| Meningkatnya Produksi Perikanan | Persentase peningkatan Produksi Perikanan | 6 | 5 | 83,33 | 6 | 4,5 | 75,00 | 6 | **5** | 83,33 | 5 | **5** | 100 | 5 | 5,02 | 100,04 | 5 | 100,04 |

Dari capaian diatas dapat dilihat bahwa ada 6 (enam) indikator kinerja Dinas Pangan dan Perikanan berkinerja sangat baik dengan capaian realisasi diatas 95% dan ada 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian realisasi dibawah 95%.

Angka Skor PPH konsumsi tidak dapat memenuhi target disebabkan karena dampak dari pandemic covid-19 tingkat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) masih kurang. komposisi makanan masih dominan hanya karbohidrat serta daya beli masyarakat akan pangan yang B2SA menurun dan karena diberlakukannya PPKM sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat sehingga berpengaruh juga terhadap pola konsumsi masyarakat.

Sosialisasi yang gencar mengenai pola Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (**B2SA**) yang sesuai kaidah PPH konsumsi berupa aneka ragam bahan pangan, mengandung karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan dan tidak tercemar bahan berbahaya yang merugikan kesehatan, perlu dilakukan agar skor PPH Konsumsi dapat tercapai.

Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada sector pangan dan perikanan berupa penyediaan informasi cuaca, pola siklus tanam/pembudidayaan ikan dan tanaman pangan yang efisien dalam pengguanaan air serta sosialisasinya sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak perubahan iklim yang terjadi.

Adapun capaian kinerja dinas Pangan dan Perikanan yang dibandingkan dengan perjanjian kinerja kepala dinas pada awal tahun anggaran 2021 beserta dukungan dana yang tersedia selengkapnya disajikan dalam tabel dibawah ini ;

**Tabel perbandingan antara capaian target Perjanjian Kinerja Kepala PD dengan realisasi anggaran**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **% Realisasi** | **Pagu Anggaran** | **Realisasi Anggaran** | **% Realisasi Anggaran** |
| Meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan utama | Angka Ketersediaan energy (Kkal/kapita/hari) | 8418 | **8587** | 102,0% | 1.854.316.500 | 1.683.550.200 | 90,79% |
| Angka Ketersediaan protein (Kkal/kapita/hari) | 218,12 | **223,16** | 102,3% |
| Angka Kecukupan energi perkapita | 2400 | **2400** | 100.0% |
| Angka Kecukupan protein perkapita | 63 | **63** | 100.0% |
| Skor PPH Konsumsi | 94 | **86** | 91.5% | 1.035.624.600 | 1.013.668.460 | 97,88% |
| Coefisien Variasi (CV Harga Pangan) | 7,2 | **7,3** | 98.6% | 353.156.000 | 343.372.000 | 97,23% |
| Meningkatkan Produksi Perikanan | Persentase peningkatan produksi perikanan | 5 | 5,02 | 100,04% | 1.197.948.000 | 1.167.595.720 | 97,46% |

Dari table diatas terlihat bahwa ada 2 (dua) capaian yang menurun yaitu Skor PPh Konsumsi 91,5% dan Coefisien Variasi (CV harga pangan) 98,6% hal ini dikarenakan dampak dari pandemic covid-19 dan diberlakukannya PPKM sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat sehingga berpengaruh juga terhadap pola konsumsi masyarakat serta Coefisien Variasi (CV) Harga Pangan tidak dapat tercapai dikarenakan dampak pandemic covid-19 mempengaruhi harga, utamanya karena musim panen yaitu peningkatan harga terjadi pada puncaknnya pada bulan pebruari dan oktober. sehingga meskipun telah didukung serapan anggaran yang baik (93.82%) namun belum dapat mencapai hasil yang diharapkan.

### Perhitungan Efisiensi Dan Nilai Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Target IKU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | | | | | Efisiensi | Nilai Efisiensi |
| Target | Realisasi | % Realisasi | Pagu Anggaran 2021 | Realisasi anggaran 2021 | % Realisasi |
| Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pangan melalui Ketersediaan, distribusi, konsumsi | Angka Ketersediaan energy (Kkal/kapita/hari) | 8418 | 8587 | 102,0% | 1.854.316.500 | 1.683.550.200 | 90,79% | **4,94%** | **62,35%** |
| Angka Ketersediaan protein (Kkal/kapita/hari) | 218,12 | 223,16 | 102,3% | 1.854.316.500 | 1.683.550.200 | 90,79% | **-16,74%** | **8,16%** |
| Angka Kecukupan energi perkapita | 2400 | 2400 | 100.0% | 1.854.316.500 | 1.683.550.200 | 90,79% | **-3,58%** | **41,05%** |
| Angka Kecukupan protein perkapita | 63 | 63 | 100.0% | 1.854.316.500 | 1.683.550.200 | 90,79% | **5,25%** | **63,12%** |
| Skor PPH Konsumsi | 94 | 86 | 91.5% | 1.035.624.600 | 1.013.668.460 | 97,88% | **6,55%** | **66,37%** |
| Coefisien Variasi (CV Harga Pangan) | 7,2 | 7,3 | 98.6% | 353.156.000 | 343.372.000 | 97,23% | **8,72%** | **71,79%** |
| Meningkatnya Produksi Perikanan | Persentase peningkatan Produksi Perikanan | 5 | 5,02 | 100.04% | 1.197.948.000 | 1.167.595.720 | 97,46% | **5,82%** | **64,55%** |

c

Untuk mencapai target kinerja indicator Kinerja Utama Dinas Pangan dan Perikanan yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja, diperlukan dukungan sumberdaya manusia ( pegawai dinas Pangan dan Perikanan) dan dukungan dana anggaran yang ada. Untuk menghitung nilai efisiensi penggunaan Sumberdaya dana mengikuti arahan Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor249/PMK.02/2011 Tgl 28 Desember 2011.

Pengukuran tingkat efisiensi (NE), adalah untuk mengukur efisiensi pemanfaatan sumber daya dana (anggaran) dalam mencapai target kinerja. Dimana semakin tinggi Nilai Efisiensi maka semakin efektif penggunaan dana dalam mencapai target kinerja Adapun pencapaian efifiensi dan nilai efisiensi tertinggi di capai oleh indicator Coefisien Variasi (CV harga pangan) dengan capaian 8,72% dan 71,79%. Di sisi lain yang capaian efisiensi yang terendah adalah Angka ketersediaan protein (Kkal/kapita/hari) dengan pencapaian efifiensi dan nilai efisiensi sebesar -16,74% dan 8,16%.

### A.3 Realisasi Anggaran

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM/ KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **SUMBER DANA** | **TARGET** | **REALISASI** | **OUTPUT/ KELUARAN** | **INDIKATOR** | | |
| **LOKASI** | **TARGET OUTPUT ( % )** | **REALISASI OUTPUT ( % )** |
| **A.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **35.500.000,00** |  | **33.500.000,00** | **33.000.000,00** |  |  |  | **92,96** |
|  | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 35.500.000,00 |  | 35.500.000,00 | 33.000.000,00 |  |  | 100 | 92,05 |
|  | Retribusi Pemakaian Ruangan | 2.500.000,00 |  | 2.500.000,00 | 0,00 |  |  | 100 | 0,00 |
|  | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa bibit atau benih ikan | 33.000.000,00 |  | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 |  |  |  | 100,00 |
| **B.** | **BELANJA DAERAH** | **10.584.547.598,00** |  | **10.584.547.598,00** | **9.930.792.678,00** |  |  |  | **93,82** |
| **a.** | **BELANJA OPERASI** | **4.788.030.024,00** |  | **4.788.030.024,00** | **4.609.140.373,00** |  |  |  | **93,78** |
| 1 | Belanja Pegawai | 4.788.030.024,00 | PAD | 4.788.030.024,00 | 4.609.140.373,00 |  |  | 100 | 93,78 |
| **b.** | **BELANJA OPERASI** | **10.500.092.598,00** |  | **10.500.092.598,00** | **9.848.036.678,00** |  |  |  | **95,07** |
| **I.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KANUPATEN/KOTA** | **570.775.800,00** |  | **570.775.800,00** | **550.814.619,00** |  |  |  | **91,08** |
|  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **34.118.500,00** |  | **34.118.500,00** | **32.226.500,00** |  |  |  | **94,45%** |
| 1 | Penyusunan Dokumen  Perencanaan Perangkat Daerah | 26.098.000,00 | PAD | 26.098.000,00 | 24.216.000,00 | 5 laporan, 7 dokumen | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 92,79% |
| 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.020.500,00 | PAD | 8.020.500,00 | 8.010.500,00 | 8 laporan, 8 kali | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 99.88% |
|  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.720.278.524,00** |  | **4.720.278.524,00** | **4.541.388.873,00** |  |  |  | **96.21%** |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.706.370.024,00 | PAD | 4.706.370.024,00 | 4.527.480.373,00 | 1274 pegawai | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 96,20% |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan  Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.908.500,00 | PAD | 3.908.500,00 | 3.908.500 | 25 laporan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 100,00% |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan  Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 10.000.000,00 | PAD | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 240 laporan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 100,00% |
|  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **624.150.000,00** |  | **624.150.000,00** | **467.342.215,00** |  |  |  | **74,88%** |
| 6 | Pengadaan Pakaian Dinas  Beserta Atribut Kelengkapannya | 24.150.000,00 | PAD | 24.150.000,00 | 22.935.000,00 | 150 meter | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 94,97% |
| 7 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 600.000.000,00 | PAD | 600.000.000,00 | 444.407.215,00 | 1250 peserta | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 74,07% |
|  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **166.106.000,00** |  | **166.106.000,00** | **150.033.643,00** |  |  |  | 90,32% |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan  Kantor | 10.936.000,00 | PAD | 10.936.000,00 | 10.899.000,00 | 100 persen | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 99,66% |
| 9 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50.000.000,00 | PAD | 50.000.000,00 | 46.375.450,00 | 100 persen | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 92,75% |
| 10 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 24.226.500,00 | PAD | 24.226.500,00 | 24.208.500,00 | 521 kotak, 521 dus | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 99,93% |
| 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 14.869.500,00 | PAD | 14.869.500,00 | 14.867.500,00 | 4 jenis | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 99,99% |
| 12 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 24.980.000,00 | PAD | 24.980.000,00 | 18.812.000,00 | 3 kali 1238 eksemplar | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 75,31% |
| 13 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 41.094.000,00 | PAD | 41.094.000,00 | 34.871.193,00 | 30 kali, 39 kali | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 84,86% |
|  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **63.455.000,00** |  | **63.455.000,00** | **62.966.000,00** |  |  |  | **99,23%** |
| 14 | Pengadaan Mebel | 10.000.000,00 | PAD | 10.000.000,00 | 9.900.000,00 | 1 unit | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 99,48% |
| 15 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 47.725.000,00 | PAD | 47.725.000,00 | 47.366.000,00 | 1 paket | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 99,00% |
| 16 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5.730.000,00 | PAD | 5.730.000,00 | 5.700.000,00 | 4 unit | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 99,25% |
|  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **288.484.474,00** |  | **288.484.474,00** | **229.187.187,00** |  |  |  | **79,45%** |
| 17 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 173.154.474,00 | PAD | 173.154.474,00 | 113.857.187,00 | 24 rekening air, 36 rekening internet, 96 rekening listrik, 36 rekening telp | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 65,75% |
| 18 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.000.000,00 | PAD | 30.000.000,00 |  | 14 jenis, 12 bulan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 100,00% |
| 19 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 85.330.000,00 | PAD | 85.330.000,00 | 85.330.000,00 | 96 kali | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 100,00% |
|  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **184.650.000,00** |  | **184.650.000,00** | **180.052.480,00** |  |  |  | **97,51%** |
| 20 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 40.610.000,00 | PAD | 40.610.000,00 | 40.075.500,00 | 1 unit, 1 unit | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 98,68% |
| 21 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 37.350.000,00 | PAD | 37.350.000,00 | 33.592.050,00 | 1 unit, 1 unit | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 99,95% |
| 22 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 19.920.000,00 | PAD | 19.920.000,00 | 19.883.000,00 | 28 unit | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 89,94% |
| 23 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 73.960.000,00 | PAD | 73.960.000,00 | 73.698.930,00 | 21 unit | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 99,81% |
| 24 | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana  Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.810.000,00 | PAD | 12.810.000,00 | 12.803.000,00 | 288 m2 | Dinas Perikanan dan Peternakan |  | 99,65% |
| **II** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN** | **1.873.146.500,00** |  | **1.873.146.500,00** | **1.700.751.600,00** |  |  |  | **90,80%** |
|  | **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **1.873.146.500,00** |  | **1.873.146.500,00** | **1.700.751.600,00** |  |  |  | **90,80%** |
| 25 | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | 1.814.316.500,00 | PAD | 1.814.316.500,00 | 1.644.712.200.00 | 4 gapoktan/poktan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 90,65% |
| 26 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | 58.830.000,00 | PAD | 58.830.000,00 | 56.039.400,00 | 2 TP. PKK dan gapoktan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 95,26% |
| **VI** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **1.214.141.600,00** |  | **1.214.141.600,00** |  | **1.187.848.960,00** |  |  | **97,83%** |
|  | **Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan** | **356.686.000,00** |  | **356.686.000,00** |  | **346.742.000,00** |  |  | **97,21%** |
| 27 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 18.167.000,00 | PAD | 18.167.000,00 | 17.198.000,00 | 1 buku, 1 buku | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 94,67% |
| 28 | Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal | 197.477.000,00 | PAD | 197.477.000,00 | 190.976.000,00 | 4 gapoktan/poktan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 96,71% |
| 29 | 'Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya | 31.959.000,00 | PAD | 31.959.000,00 | 31.959.000,00 | 4 kali,8 kali | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 100,00% |
| 30 | Pemantauan stok pasokan dan harga pangan | 3.447.000,00 | PAD | 3.447.000,00 | 3.326.000,00 | 8 kali, 62 gapoktan dan TTI | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 96,49% |
| 31 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | 3.530.000,00 | PAD | 3.530.000,00 | 3.370.000,00 | 1 kali | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 95,47% |
| 32 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | 102.106.000,00 | PAD | 102.106.000,00 | 99.913.000,00 | 12 kali, 53 TTI | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 97,85% |
|  | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **857.455.600,00** |  | **857.455.600,00** | **841.106.960,00** |  |  |  | **98,09%** |
| 33 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | 24.825.000,00 | PAD | 24.825.000,00 | 22.972.500,00 | 1 dokumen | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 92,54% |
| 34 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 822.120.000,00 | PAD | 822.120.000,00 | 808.669.460,00 | 3 event, 5 kali, 80 persen | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 98,36% |
| 35 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | 10.510.600,00 | PAD | 10.510.600,00 | 9.465.000,00 | 4 kali | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 90,05% |
|  | **PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** |  |  |  |  |  |  |  | **97,10%** |
|  | **Penanganan Kerawanan Pangan kewenangan kabupaten/ kota** | **40.000.000,00** |  | **40.000.000,00** | **38.838.000,00** |  |  |  | **97,10%** |
| 36 | Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalan1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | 40.000.000,00 | PAD | 40.000.000,00 | 38.838.000,00 | 2 desa | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 97,10% |
|  | **PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** |  |  |  |  |  |  |  | **96,91%** |
|  | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | **178.069.000,00** |  | **178.069.000,00** | **172.561.500,00** |  |  |  | **96,91%** |
| 37 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 164.883.000,00 | PAD | 164.883.000,00 | 160.411.500,00 | 8 kegiatan, 3 kali, 30 peserta | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 97,29% |
| 38 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 13.186.000,00 | PAD | 13.186.000,00 | 12.150.000,00 | 32 sample | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 92,14% |
| **IX** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **10.000.000,00** |  | **10.000.000,00** | **9.680.000,00** |  |  |  | **96,80%** |
|  | **Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai,danau,waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **10.000.000,00** |  | **10.000.000,00** | **9.680.000,00** |  |  |  | **96,80%** |
| 39 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 10.000.000,00 | PAD | 10.000.000,00 | 9.680.000,00 | 2 kUB | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 96,80% |
|  | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **1.102.313.500,00** |  | **1.102.313.500,00** | **1.075.120.720,00** |  |  |  | **96,80%** |
|  | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | **57.783.500,00** |  | **57.783.500,00** | **56.362.500,00** |  |  |  | **97,54%** |
| 40 | Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil | 57.783.500,00 | PAD | 57.783.500,00 | 56.362.500,00 | 110 orang | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 97,54% |
|  | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **1.044.530.000,00** |  | **1.044.530.000,00** | **1.018.758.220,00** |  |  |  | **97,53%** |
| 41 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 506.950.000,00 | PAD | 506.950.000,00 | 496.643.300,00 | 4 paket, 2 paket, 80 juta ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 97,97% |
| 42 | Penjaminan Ketersediaan Sarana pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 487.580.000,00 | PAD,DAK FISIK | 487.580.000,00 | 473.936.420,00 | 6 pokdakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 97,20% |
| 43 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 50.000.000,00 | DID | 487.580.000,00 | 48.178.500,00 | 40 orang | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 96,36% |
|  | **PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **85.634.500,00** |  | **85.634.500,00** | **82.795.000,00** |  |  |  | **96,68%** |
|  | **Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota** | **85.634.500,00** |  | **85.634.500,00** | **82.795.000,00** |  |  |  | **96,68%** |
| 44 | Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | 85.634.500,00 | PAD,DID | 85.634.500,00 | 82.795.000,00 | 100 orang | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 96,68% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hampir semua program yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan memiliki prosentase realisasi lebih dari 85%. Secara ringkas capaian tiap program yang dilnakan di tahun 2021 disajikan sebagai berikut;

**Prosentase capaian program Dinas Pangan dan perikanan Tahun Anggaran 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM/ KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **PROSENTASE** |
|
|  | **BELANJA OPERASI** | **10.584.547.598,00** | **10.584.547.598,00** | **9.930.792.698,00** | **93,82** |
| **I.** | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **6.081.242.498,00** | **6.081.242.498,00** | **5.663.196.898,00** | **93,13** |
| **II** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN** | **1.873.146.500,00** | **1.873.146.500,00** | **1.700.751.600,00** | **90,80** |
| **III** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **1.214.141.600,00** | **1.214.141.600,00** | **1.187.848.960,00** | **97,83** |
| **IV** | **PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **40.000.000,00** | **40.000.000,00** | **38.838.000,00** | **97,10** |
| **V** | **PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **178.069.000,00** | **178.069.000,00** | **172.561.500,00** | **96,91** |
| **VI** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **9.680.000,00** | **96,80** |
| **VII** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **1.102.313.500,00** | **1.102.313.500,00** | **1.075.120.740,00** | **97,53** |
| **VIII** | **PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **85.634.500,00** | **85.634.500,00** | **82.795.000,00** | **96,68** |

1. Dukungan Kegiatan dari Dana Tugas Pembantuan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NOMOR SP DIPA | Nomer kode dan nomer program atau kegiatan | | Anggaran (Rp.000) | | | | Penyerapan (Rp.000) | | Indikator Kinerja Keluaran | | | | Instansi Penanggung Jawab |
| No. Loan | PHUI | Rupiah | TOTAL | S | R | Narasi | Satuan ( Unit) | S (%) | R (%) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | SP DIPA - 018.11.14.HA | Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | |  |  | 233.692.000 | 233.692.000 | 233.692.000 | 233.418.000 | sudah terealisasi semua |  | 100 | 99,88 | Dinas Pertanian dan KP Prov Jatim |
|
|
|
|  | 1 | 1815 Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan |  |  | 28.460.000 | 28.460.000 | 28.460.000 | 28.460.000 | sudah terealisasi semua | 3 | 100 | 100 | Dinas Pertanian dan KP Prov Jatim |
|  | 2 | 1816 Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan |  |  | 205.232.000 | 205.232.000 | 205.232.000 | 204.958.000 | sudah terealisasi semua |  | 100 | 99,86 | Dinas Pertanian dan KP Prov Jatim |
|  |  | Program Dukungan Manajemen |  |  | 19.164.000 | 19.164.000 | 19.164.000 | 18.780.000 | sudah terealisasi semua |  | 100 | 97,99 | Dinas Pertanian dan KP Prov Jatim |
|  | 3 | 1817 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan |  |  | 19.164.000 | 19.164.000 | 19.164.000 | 18.780.000 | sudah terealisasi semua | 1 | 100 | 97,99 | Dinas Pertanian dan KP Prov Jatim |

# BAB IV PENUTUP

Dari uraian yang telah disampaikan bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 memiliki capaian dalam kategori Baik. Dijelaskan masing-masing indikator sasaran sebagai berikut :

1. Indikator : Angka Ketersediaan energy (Kkal/kapita/hari): Target 8.418 Realisasi 8587 : prosentase realisasi adalah 102,0 % dari target 2021 dengan Kategori sangat berhasil**.**
2. Indikator : Angka Ketersediaan protein (Kkal/kapita/hari): Target 218,12 Realisasi 223,63 : prosentase realisasi adalah 102,3 % dari target 2021 dengan Kategori Sangat berhasil**.**
3. Indikator : Angka Kecukupan protein perkapita : Target 63 ;Realisasi 63 prosentase realisasi adalah 100,0% dari target 2021 dengan Kategori Sangat berhasil**.**
4. Indikator : Angka Kecukupan energi perkapita: Target 2.400 ;Realisasi 2.400 : prosentase realisasi adalah 100.0% dari target 2021 dengan Kategori Sangat berhasil**.**
5. Indikator : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi : Target 94 ;Realisasi 86 : prosentase realisasi adalah 91.5% dari target 2021 dengan Kategori Sangat berhasil**.**
6. Indikator : Coefisien Variasi (CV harga pangan) : Target 7,2 Realisasi 7,3 : Pencapaian ; prosentase realisasi adalah 98,6% dari target 2021 dengan Kategori Sangat berhasil**.**
7. Indikator : Jumlah Produksi Perikanan ; Target 5 Realisasi ; 5,02 ; prosentase realisasi adalah 100,04% dari target 2021 dengan Kategori Sangat berhasil**.**

Dari sisi anggaran untuk menunjang pencapaian target sasaran, dari pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 10.584.547.598,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.930.792.678,00 yang memiliki prosentase realisasi 93,82%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2021 sudah cukup baik.

Adapun Langkah-langkah yang akan dilakukan Dinas Perikanan dan Peternakan untuk meningkatkan kinerja adalah :

1. Meningkatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam perumusan kebijakan
3. Mengoptimalkan serta memanfaatkan peluang peningkatan kwalitas SDM
4. Meningkatkan Kualitas pelayanan kepada masyarakat
5. Meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan teknis, seminar, lokakarya dan sebagainya
6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengimplementasian kebijakan kepala daerah di tingkat wilyah
7. Tingkatkan pembiayaan dalam mendorong pembangunan pertanian

# LAMPIRAN I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TABEL TARGET DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 | | |
|  |  |  |
| URUSAN | | : PANGAN |
| NAMA SKPD | | : DINAS PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGAWI |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM** | **KEGIATAN** | **ALOKASI** | | | | **OUTPUT** |
| **ANGGARAN** | | **REALISASI** | |
| **BARANG JASA** | **MODAL** | **BARANG JASA** | **MODAL** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KANUPATEN/KOTA** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | 34.118.500,00 | 0,00 | 32.226.500,00 |  | 5 laporan, 7 dokumen , 8 laporan, 8 kali |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | 4.720.278.524,00 | 0,00 | 4.541.388.873,00 |  | 1274 pegawai, 20 laporan, 240 laporan |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | 624.150.000,00 | 0,00 | 467.342.215,00 |  | 1250 peserta. 150 meter |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | 166.106.000,00 | 0,00 | 150.033.643,00 |  | 521 kotak, 521 dus |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | 63.455.000,00 | 62.966.000,00 | 0,00 |  | 1 iunit, 1 paket, 4 unit |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | 288.484.474,00 | 0,00 | 229.187.187,00 |  | 24 rekening,36 rekening,96 rekening listrik |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | 184.650.000,00 | 0,00 | 180.052.480,00 |  | 1 unit, 1 unit, 288 m2,28 unit, 21 unit |
| **2** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN** | **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | 1.873,146.500,00 | 0,00 | 1.700.751.600,00 |  | 4 gapoktan/poktan |
| **3** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan** | 1.214.141.600,00 | 0,00 | 1.187.848.960,00 |  | 1 buku, 1 buku, 4 gapoktan/poktan, 4 kali, 8 kali, 8 kali 62 gapoktan dan TTI, 1 kali, 12 kali, 53 TTI |
|  |  | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | 857.455.600,00 | 0,00 | 841.106.960,00 |  | 1 dokumen, 3 event, 5 kali, 80 persen |
| **4** | **PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **Penanganan Kerawanan Pangan kewenangan kabupaten/ kota** | 40.000.000,00 | 0,00 | 38.838.000,00 |  | 2 desa |
| **5** | **PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | 178.069.000,00 | 0,00 | 172.561.500,00 |  | 8 kegiatan, 3 kali, 30 peserta |
| **6** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai,danau,waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | 10.000.000,00 | 0,00 | 9.680.000,00 |  | 2 KUB |
| **7** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | 57.783.500,00 | 0,00 | 56.362.520,00 |  | 110 orang |
| **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | 1.044.530.000,00 | 19.790.000,00 | 998.968.220,00 |  | 4 paket, 2 paket, 80 juta ekor |
| **8** | **PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota** | 85.634.500,00 | 0,00 | 82.795.000,00 |  | 100 orang |
|  |  | **Jumlah** | **10.584.547.598,00** | **82.756.000,00** | **9.848.036.698,00** |  |  |